

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2015). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Chainur Arrasjid. (2018). *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Utrecht. (1960). *Rangkaian Sari Kuliah Perdana Hukum Pidana 1*. Bandung: Universitas.
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Frank E. Hagan. (2015). *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Prenada Media.
- H. A. Zainal Abidin Farid. (2014). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernold Ferry Makawimbang, (2015), "Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang", Yogyakarta Thafa Media,
- IGM Nurjana. (2010). *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi ; Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), 2014, *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irwansyah, & Ahsan Yunus. (2020). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.

- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kristian, & Yopi Gunawan. (2018). *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marwan Effendy. (2012). *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi.
- Mispansyah, & Amir Ilyas. (2016). *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan yurisprudensi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno, (1983), "Azas-Azas Hukum Pidana", Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Djafar Saidi, & Eka Merdekawati Djafar. (2021). *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Buku Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pradhita Rika Nagara. (2014). *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- R. Wiyono. (2006). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- (2007). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.

Teguh Pudjo Mulyono. (2006). *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE.

Tisadini dan Abd Shomad. (2019). *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana

Yenti Garnasih. (2017). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

JURNAL

Elma Rianti, Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap Dan/Atau Tindakan Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara*, *Jurnal Hukum dan Kenotarian* Volume 6 Nomor 2 mei 2022.

Erman Rajagukguk, (2006). "Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara", *Makalah disampaikan pada Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi"*, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta, 26 Juli 2006.

Ichsan Ansari. (2021, Desember). *Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Bentuk Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung (Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan)*. Jurnal Unes Law Review, Volume 4.

Ni Luh Wayan Korin Agustini, Cok Istri Anom Pelayun dan Dewa Gede Rudy, 2017 "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin dalam Kredit Fiktif", Kertha Semaya, Volume 5, Nomor 1.

Suci Sulistiawati, Elsa Rina Maya Toule, dan Margie Gladies Sopacua, 2022, *Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank*, *Jurnal Tatohi*, Volume 2 nomor 5 juli 2022.

Zainal Azikin, Lalu Wira Pria Suhartana dan Usman, 2019, *Aspek Pertanggungjawaban keuangan Negara Dalam BUMN*, Jurnal Kompilasi Hukum, Volume 4 No. 2, Desember 2019.

SKRIPSI

Fajrina Madanie Basuki. (2022). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Nasabah Kartu kredit Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Studi Putusan No. 97/Pid.Sus TPK/PN.Mks)*. Makassar: Universitas Bosowa.

Indra Saputra Taslim HS. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.SBY)*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

TESIS

Elmarianti. (2022). *Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Rafno. (2019). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)*. Jambi: Universitas Batanghari.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2021/PN Mks.